

PENGUNAAN AKRONIM TERHADAP PIDATO PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DAN JAJARAN MENTERI DI RAKORNAS 2024 SICC BOGOR MELALUI KANAL YOUTUBE KOMPAS: ANALISIS BERBASIS KORPUS

Dini Arifa Ayunisa

Mahasiswa Pascasarjana, Jurusan Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Airlangga
diniayunisa16@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akronim digunakan dalam pidato Presiden, Wakil Presiden, dan Jajaran Menteri pada Rakornas 2024 di SICC Bogor sebagai alat strategis dalam perdebatan politik. Penelitian ini menyelidiki pola frekuensi, kolokasi, dan makna akronim baru melalui penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam analisis korpus. Menggunakan perangkat lunak AntConc, data utama diproses untuk analisis kolokasi dan konkordansi dari teks pidato yang diambil dari saluran YouTube Kompas. Hasil utama menunjukkan bahwa akronim seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia), UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sering digunakan, menekankan masalah strategis seperti keamanan nasional, pengembangan ekonomi, dan pemberantasan korupsi. TNI dan UMKM biasanya dikaitkan dengan pertahanan, dan akronim ditempatkan dalam konteks tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa akronim tidak hanya menjadikan komunikasi politik lebih sederhana, tetapi juga membuatnya lebih efektif dan relevan, terutama bagi generasi muda yang terbiasa dengan komunikasi singkat di era digital. Penggunaan akronim menunjukkan bahwa pemerintah ingin menyampaikan pesan yang strategis dan menarik melalui wacana politik kontemporer.

Kata kunci: *akronim, wacana politik, analisis korpus, generasi muda*

PENDAHULUAN

Bahasa di era modern juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Fairclough (1995) menyatakan bahwasannya sebuah Bahasa tidak hanya berfungsi untuk berkomunikasi akan tetapi juga menciptakan makna dan menunjukkan korelasi antara ideologi dan kekuasaan. Dalam teori Fairclough menggarisbawahi tentang bagaimana peran Bahasa membentuk dan merefleksikan hubungan kekuasaan melalui wacana. Pada pidato politik, pemanfaatan akronim dapat ditafsirkan sebagai sebuah strategi untuk merepresentasikan ideologi atau pemikiran dan juga otoritas melalui bentuk komunikasi yang ringkas dan efisien. Pidato politik menjadi alat penting untuk menunjukkan kekuasaan politik menjadi alat penting untuk menunjukkan kekuasaan politik itu sendiri dan juga kepentingan melalui struktur wacana, dan komponen linguistik seperti akronim.

Bahasa sebagai alat komunikasi terus berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, terutama dalam hal komunikasi politik. Bahasa yang efektif menjadi penting untuk berkomunikasi di era komputer dan internet saat ini, terutama jika Anda ingin berbicara dengan audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda. Akronim, salah satu cara penyederhanaan bahasa, sangat membantu dalam menyampaikan pesan yang kompleks. Penggunaan akronim dalam pidato politik tidak hanya menunjukkan kemanjuran, tetapi juga membuat audiens tertarik secara intelektual dan emosional. Contohnya, akronim seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau TNI (Tentara Nasional Indonesia) sering digunakan untuk menunjukkan masalah penting yang ada di agenda politik, seperti ekonomi kerakyatan atau keamanan nasional. Hal ini tidak hanya membuat komunikasi lebih mudah, tetapi juga memfokuskan perhatian pada masalah strategis yang menjadi perhatian pemerintah.

Edukasi dalam lingkungan media sosial dan komunikasi digital, generasi muda sering menggunakan akronim dalam percakapan sehari-hari di platform seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Oleh karena itu, penggunaan akronim dalam pidato politik meningkatkan komunikasi dan menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan generasi muda. Bahasa dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan audiens yang beragam dalam konteks sosial dan budaya yang terus berubah, seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan akronim ini.

Selain itu, memasukkan analisis korpus ke dalam penelitian ini menawarkan cara baru untuk memahami peran akronim dalam wacana politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola

komunikasi politik yang mencerminkan prioritas ideologis dan strategi komunikasi pemerintah dengan menganalisis penggunaan akronim, kolokasi, dan konteksnya. Akronim tidak hanya berfungsi sebagai alat linguistik yang bermanfaat, tetapi juga merupakan simbol yang signifikan untuk menyampaikan visi politik dan membangun legitimasi di mata publik. Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana bahasa, khususnya akronim, digunakan untuk menyampaikan pesan politik yang efektif, relevan, dan menarik di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas aspek linguistik tetapi juga membahas bagaimana bahasa, kekuasaan, dan teknologi berinteraksi dalam komunikasi politik kontemporer.

Salah satunya ialah penggunaan akronim yang dominan dilakukan oleh kalangan remaja saat ini. Pemuda saat ini kerap sekali menggunakan akronim di berbagai pertemuan dan juga media sosial seperti Instagram, Youtube, dan lain-lain. Selain banyaknya akronim yang kerap digunakan di sosial media menyebabkan bertambah banyaknya akronim baru yang muncul. Seperti contoh yang sering diucapkan di kalangan anak muda yakni “baper” yang memiliki makna terbawa perasaan, atau bucin yang memiliki makna “budak cinta”. Dan juga dalam pemerintahan akronim dari kata “Kemendikbud” digunakan sebagai bentuk penggambaran suatu lembaga pemerintahan yang justru lebih kecil, yaitu “Kominfo” yang berarti “Kementrian Komunikasi dan Informasi”, serta “Kemensos” yang berarti “kementrian Sosial”, dan sebagainya. Penggunaan akronim dalam Pidato Presiden, Wakil Presiden, dan Jajaran Menteri pada Rakornas di SICCC Bogor, yang menjadi viral dan disorot oleh beberapa media online seperti Youtube, menunjukkan pendekatan komunikasi kontemporer. Inovasi akronim yang ia gunakan tidak hanya membuat pesannya lebih mudah disampaikan, namun juga turut mencuri perhatian pengguna internet, seperti yang ditunjukkan oleh ribuan komentar serta jumlah penonton yang signifikan pada video pidatonya di saluran Youtube resmi Kompas.

Pada penelitian sebelumnya, Sartika (2021) mengkaji tentang penggunaan akronim di media sosial Instagram, yang menunjukkan bahwa akronim kerap digunakan untuk mempermudah komunikasi antar pengguna. Jupriono et al. (2023) mengkaji tentang bagaimana akronim dimanfaatkan dalam kritik sosial, sementara dalam penelitian Anam et al. (2021) menandai bahwa adanya pembentukan akronim dalam media cetak seperti koran, majalah dan lain-lain. Walaupun terdapat berbagai konteks penelitian yang telah menelaah tentang akronim, penelitian ini berfokus pada pidato politik terutama dalam keterkaitan penelitian ini dengan penggunaan akronim baru menjadi signifikan. Oleh karena itu, studi ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur terkait penggunaan akronim dalam wacana komunikasi politik modern.

Penelitian ini memiliki keunikan dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya karena mengintegrasikan metode analisis korpus dalam mengkaji frekuensi kemunculan akronim baru dalam pidato politik. Selain itu, penelitian ini memberikan penekanan khusus pada penggunaan akronim sebagai strategi komunikasi untuk menarik perhatian generasi muda, terutama dalam lanskap politik Indonesia yang semakin terdigitalisasi dan erat kaitannya dengan dinamika media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis frekuensi akronim yang terdapat dalam Pidato Presiden, Wakil Presiden, dan Jajaran Menteri di SICCC Bogor, mengidentifikasi frekuensi penggunaannya guna memahami pola pemakaian yang muncul, serta mengeksplorasi makna dan fungsi akronim tersebut dalam membangun wacana politik yang relevan dan menarik bagi audiens muda.

Meskipun demikian, akronim dalam pidato politik berperan strategis dan merefleksikan tren bahasa di era modern. Melalui kolokasi, akronim dapat dipelajari dalam konteks analisis korpus untuk memahami pola dan penggunaannya secara mendalam. Pidato Presiden, Wakil Presiden, dan Jajaran Menteri menghadirkan akronim baru yang merepresentasikan visi politik dan legitimasi kekuasaan. Penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh sosial-linguistik akronim dalam menyusun wacana politik yang bermakna dan efektif berdasarkan teori representasi Fairclough.

METODOLOGI

Pada Rakornas 2024 di SICCC Bogor, penggunaan akronim dalam pidato Presiden, Wakil Presiden, dan menteri diteliti melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data utama berasal dari teks pidato yang diunduh dari kanal YouTube resmi Kompas. Teks pidato tersebut kemudian ditranskripsi menjadi teks untuk analisis lebih lanjut. Korpus penelitian terdiri dari total 33.675 token, yang mencakup semua kata yang ditemukan dalam pidato. Data ini menunjukkan berbagai topik wacana politik, termasuk keamanan, ekonomi, dan pemberantasan korupsi.

Perangkat lunak AntConc adalah alat utama yang digunakan dalam penelitian ini karena memiliki kemampuan untuk menganalisis data berbasis korpus, seperti mencari frekuensi kata, kolokasi, dan konkordansi. Dalam penelitian ini, AntConc digunakan untuk mengidentifikasi akronim, menghitung frekuensi kemunculannya, dan mempelajari hubungan kolokasi yang menyertainya. Selain itu, analisis konkordansi membantu memahami konteks linguistik di mana akronim digunakan.

Penelitian melibatkan banyak tahap. Pertama, teks ditranskripsi untuk memastikan data siap untuk diolah. Setelah itu, teks diunggah ke AntConc untuk analisis awal, yang melibatkan pengenalan dan penghitungan akronim yang muncul. Kemudian dilakukan analisis kolokasi untuk mengidentifikasi kata-kata yang sering digunakan bersama dengan akronim tertentu. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa prosedur ini membantu memahami hubungan semantis dan relevansi akronim dalam pidato. Artinya, makna ideologis atau strategis yang terkandung dalam pidato dapat ditemukan melalui konteks penggunaan akronim.

Penelitian ini tidak hanya menghasilkan data kuantitatif yang menunjukkan pola distribusi akronim tetapi juga melakukan analisis kualitatif untuk memahami bagaimana akronim digunakan secara efektif sebagai alat komunikasi politik. Kombinasi metode ini memungkinkan penelitian untuk menjelaskan peran akronim dalam membangun wacana politik kontemporer secara menyeluruh.

ANALISIS

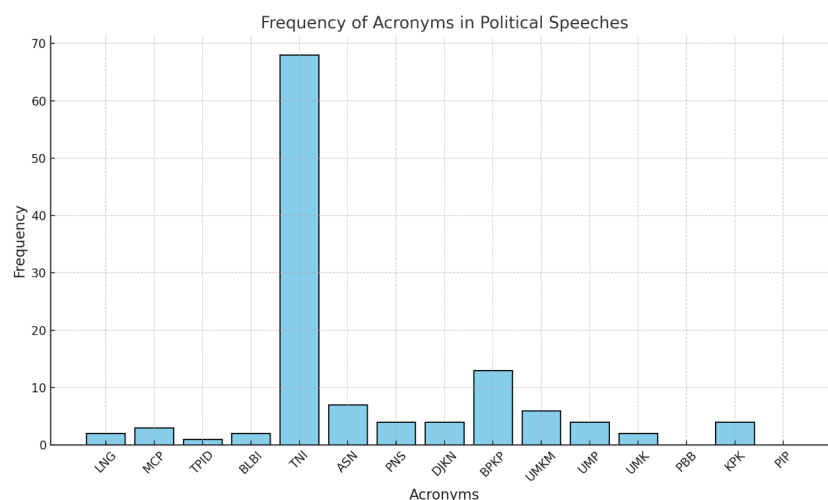


Diagram 1. Frekuensi dan Kolokasi Akronim pada Pidato Rakornas 2024 di SICC

Hasil analisis menunjukkan bahwa akronim "TNI" muncul sebanyak 68 kali dalam pidato yang dianalisis, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap masalah stabilitas dan pertahanan negara. Ini juga menunjukkan bahwa akronim "TNI" sering dikaitkan dengan kata-kata seperti "kedaulatan" dan "ketahanan nasional", yang memperkuat narasi pemerintah tentang pentingnya pertahanan sebagai fondasi keberlanjutan negara. Sebanyak enam kali muncul, akronim "UMKM" menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Istilah yang sering muncul bersama "UMKM" mencakup istilah "pemberdayaan ekonomi" dan "kesejahteraan sosial," yang menunjukkan prioritas pemerintah untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari agenda inklusif.

Sementara itu, akronim "KPK" disebut empat kali, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi. Kolokasi terkait dengan "KPK" sering kali mencakup istilah seperti "integritas" dan "transparansi," yang menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui reformasi kelembagaan dan penguatan etika pemerintahan. Yang mengakibatkan penggunaan akronim-akronim tersebut tidak hanya membuat pesan politik yang rumit lebih mudah dikomunikasikan, tetapi juga membantu ideologi dan legitimasi pemerintah dalam membangun narasi politik yang strategis.

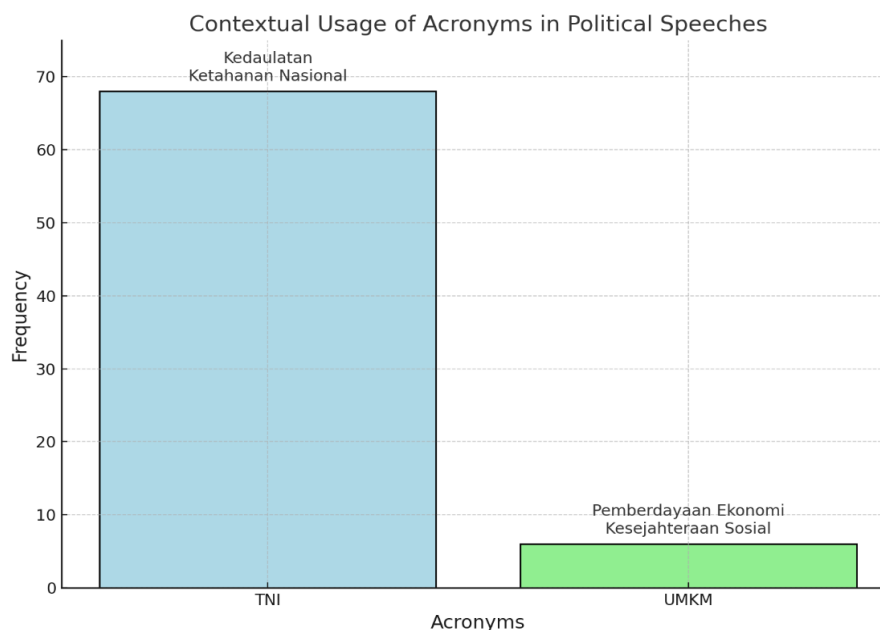


Diagram 2. Konteks Penggunaan Akronim pada Pidato Rakornas 2024

Dalam hal penggunaan akronim, pidato-pidato yang dipelajari menunjukkan bahwa akronim tidak hanya membantu menyampaikan pesan dengan lebih mudah, tetapi juga menegaskan tujuan politik pemerintah. Misalnya, akronim "TNI", yang berarti Tentara Nasional Indonesia, sering dikaitkan dengan kata-kata seperti "kedaulatan" dan "ketahanan nasional". Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya pertahanan negara sebagai pilar stabilitas nasional. Penggunaan akronim ini mencerminkan sejarah strategis pemerintah yang menempatkan keamanan sebagai prioritas utama dalam menjaga kedaulatan negara.

Sementara itu, akronim "UMKM", yang disebut enam kali dalam pidato tersebut, sering dikaitkan dengan kata-kata seperti "pemberdayaan ekonomi" dan "kesejahteraan sosial." Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi masyarakat kecil adalah prioritas utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan inklusi. Storyline ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat dan peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang kompetitif. Dalam hal ini, penggunaan akronim menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan bahasa yang sederhana namun strategis untuk menyampaikan pesan yang rumit. Akronim seperti "TNI" dan "UMKM" telah berkembang menjadi representasi yang tidak hanya menunjukkan institusi atau sektor tertentu, tetapi juga mencerminkan prinsip ideologis yang diinginkan pemerintah, seperti keamanan, pemberdayaan, dan inklusi.

Menurut teori Fairclough, analisis wacana kritis terdiri dari tiga dimensi utama: dimensi Teks, Dimensi praktik wacana kritis, dan Dimensi praktik sosial. Ketiga dimensi ini memberikan struktur analitis yang menyeluruh yang diperlukan untuk memahami bagaimana akronim digunakan sebagai alat strategis dalam komunikasi politik.

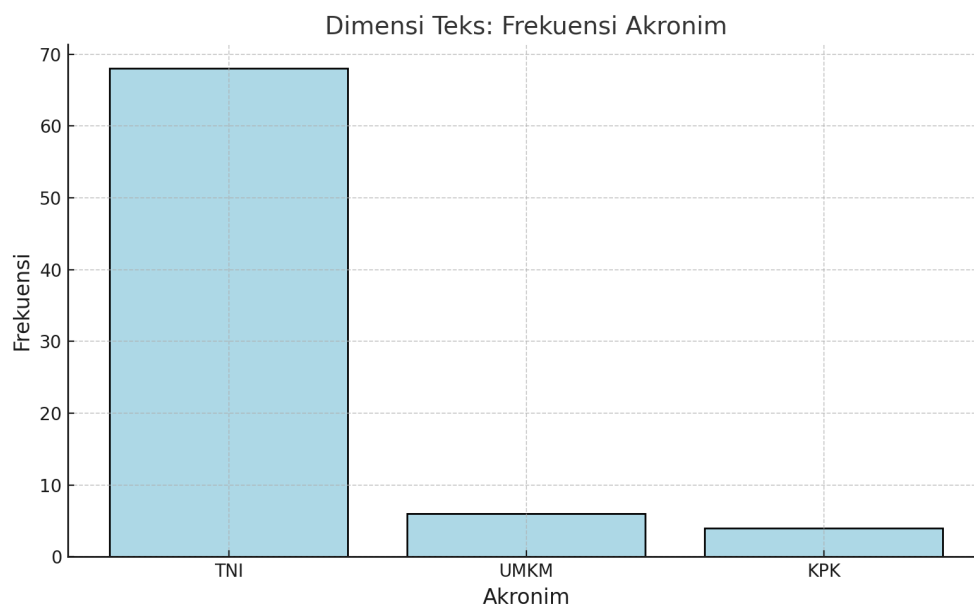


Diagram 3. Dimensi Teks

Akronim seperti "TNI", "UMKM", dan "KPK" digunakan untuk menekankan masalah utama yang dibicarakan, seperti keamanan, ekonomi, dan pemberantasan korupsi. Akronim ini tidak hanya merupakan bentuk bahasa yang sederhana, tetapi juga merupakan simbol ideologis yang signifikan. Pemerintah mampu menyampaikan pesan yang kompleks dalam bentuk yang lebih sederhana dengan menggabungkan topik strategis dalam akronim yang mudah diingat. Hal ini penting terutama bagi generasi muda, yang lebih akrab dengan komunikasi cepat dan padat di era digital. Pesan-pesan ini lebih mudah diterima dan diingat oleh audiens yang lebih luas berkat struktur linguistik akronim yang ringkas, ringkas, dan kuat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jupriono et al. (2023), yang menunjukkan bahwa akronim dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk membuat narasi sosial-politik yang kuat, terutama dalam konteks debat politik kontemporer.

Penelitian yang dilakukan oleh Jiang dan Raza (2023) menyatakan bahwa transparansi dalam wacana politik kontemporer merupakan komponen penting dalam meningkatkan legitimasi pemerintah di mata publik. Oleh karena itu, istilah "KPK" tidak hanya menunjukkan keinginan untuk melakukan reformasi, tetapi juga menunjukkan prinsip-prinsip yang dianut pemerintah dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dhika dan Rizal (2023) menyatakan bahwa bahasa strategis yang digunakan dalam komunikasi politik, termasuk penggunaan akronim, menarik bagi generasi muda karena mereka lebih terbiasa dengan gaya komunikasi digital yang cepat dan padat.

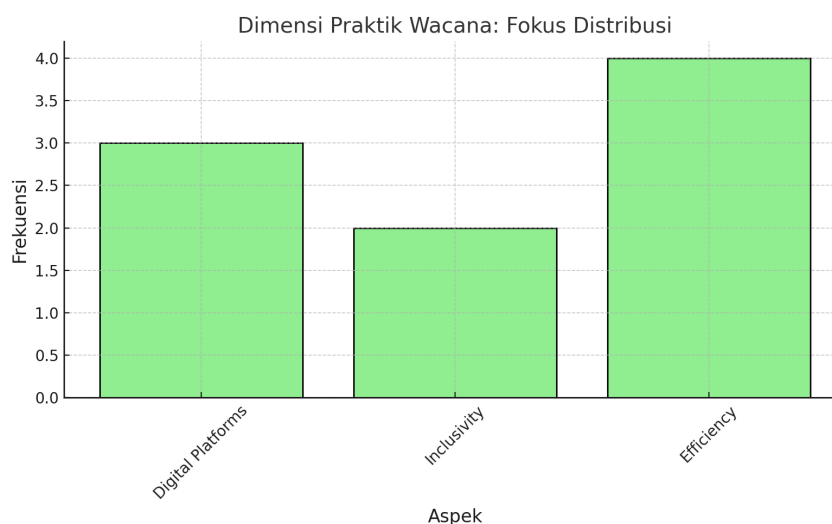


Diagram 4. Dimensi Praktik Wacana

Dalam komunikasi politik, praktik wacana mencakup bagaimana akronim dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsi. Akronim menunjukkan upaya pemerintah untuk membuat pesan yang efektif dan efisien yang kemudian didistribusikan melalui berbagai platform komunikasi, termasuk media digital seperti YouTube. Platform media digital memungkinkan audiens yang lebih besar untuk mengakses pidato-pidato ini, yang membuat komunikasi politik lebih inklusif. Akronim seperti "TNI" dan "UMKM" membantu pemerintah menjangkau banyak orang, dari generasi muda hingga masyarakat umum, dengan menyampaikan pesan yang kompleks secara ringkas. Menurut Adam et al. (2024), bahasa sederhana seperti akronim sangat penting untuk menyampaikan pesan ekonomi yang kompleks kepada khalayak luas. Oleh karena itu, akronim "UMKM" digunakan untuk menunjukkan secara strategis komitmen pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat. Bahasa yang efektif dalam wacana politik dapat membantu menyampaikan pesan-pesan yang kompleks dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh audiens yang lebih luas. Johnstone dan Andrus (2024).

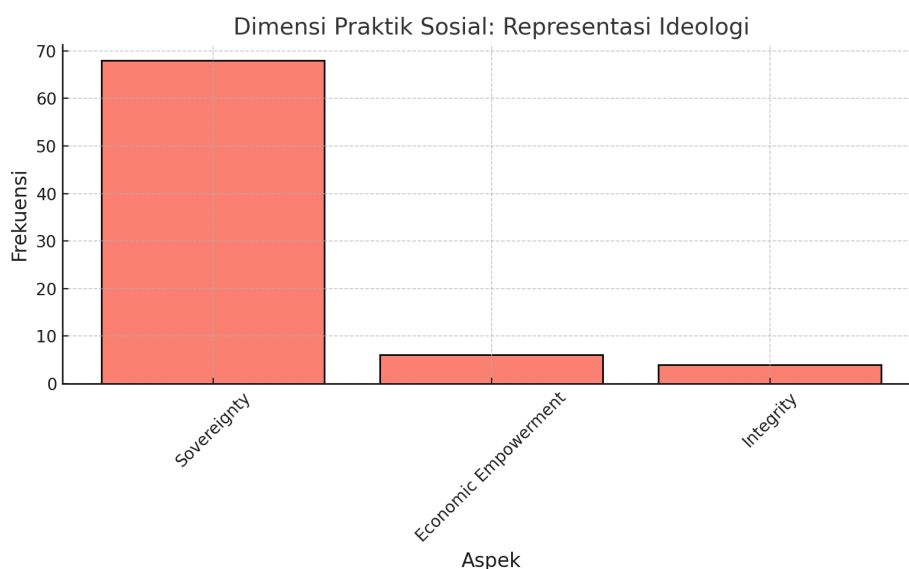


Diagram 5. Dimensi Praktik Sosial : Representasi Ideologi

Dimensi praktik sosial menghubungkan penggunaan akronim dengan ideologi dan kekuasaan pemerintah. Misalnya, "TNI" tidak hanya merujuk pada lembaga pertahanan negara tetapi juga menjadi simbol kedaulatan dan stabilitas nasional. Hal tersebut mencerminkan prioritas utama pemerintah dalam memastikan keamanan negara sebagai fondasi keberlanjutan bangsa. Demikian pula, "UMKM" tidak hanya mencerminkan sektor ekonomi kecil dan menengah tetapi juga mengkomunikasikan komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan inklusivitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Lambach dan Oppermann (2023) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan akronim-akronim ini, pemerintah membangun legitimasi politik melalui bahasa yang sederhana namun bermakna dalam, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini memungkinkan untuk mempelajari bagaimana persepsi orang tentang akronim dapat berbeda tergantung pada usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial-budaya mereka. Misalnya, dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua, generasi muda yang lebih terbiasa dengan komunikasi digital mungkin lebih mudah menerima dan memahami penggunaan akronim. Hal ini menunjukkan bahwa akronim memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi sosial dalam wacana politik, tetapi jika tidak digunakan dengan benar, mereka juga dapat menciptakan jarak dalam komunikasi.

Secara keseluruhan, penggunaan akronim dalam pidato Rakornas 2024 menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan strategi komunikasi yang sangat baik untuk menyampaikan pesan politik yang kompleks dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Hal tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga membantu membangun legitimasi politik melalui narasi yang masuk akal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa akronim membangun ideologi dan legitimasi pemerintah dan merupakan alat linguistik strategis untuk menyederhanakan komunikasi politik. Akronim seperti TNI, UMKM, dan KPK tidak hanya digunakan untuk membuat pesan yang kompleks lebih mudah dipahami, tetapi juga digunakan untuk menunjukkan masalah penting seperti stabilitas nasional, pemberdayaan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Akronim digunakan dalam dimensi teks untuk menyampaikan pesan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh banyak orang, seperti generasi muda yang lebih terbiasa dengan gaya komunikasi digital yang cepat dan padat.

Akronim dalam konteks wacana memungkinkan pemerintah untuk menyebarkan pesan politiknya melalui berbagai platform terutama media digital seperti YouTube yang memperluas jangkauan audiens sekaligus meningkatkan inklusi. Di sisi lain, dalam konteks praktik sosial, akronim berfungsi sebagai simbol ideologi dan kekuasaan yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menghasilkan narasi politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepercayaan publik dan partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh penggunaan akronim dalam pidato politik, terutama di era digital. Akronim, yang bentuknya sederhana, dapat digunakan sebagai alat strategis untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Akronim seperti TNI atau UMKM dapat berfungsi sebagai representasi komitmen pemerintah terhadap masalah strategis seperti stabilitas nasional dan pemberdayaan ekonomi ketika digunakan secara konsisten dan relevan. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik karena pemerintah tampak komunikatif dan mudah dipahami. Namun, penggunaan akronim yang berlebihan atau tidak konsisten dapat menyebabkan kebingungan dan skeptisisme di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih memperhatikan komunikasi politik.

Selain menghasilkan temuan penting, wawancara ini juga menemukan banyak celah penelitian yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Salah satu perbedaan yang signifikan adalah penelitian mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap akronim dapat bervariasi berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial-budaya. Penelitian mendalam juga diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan akronim memengaruhi partisipasi politik, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif di media sosial. Penelitian lebih lanjut juga dapat melihat bagaimana akronim digunakan dalam konteks global. Bagaimana akronim berfungsi dalam diskusi politik lokal dan nasional, termasuk bagaimana mereka digunakan untuk mengatasi perbedaan bahasa dan budaya di berbagai daerah, adalah aspek lain yang menarik untuk diteliti.

Selain itu, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memahami peran akronim dalam membangun narasi politik di era disrupsi digital, di mana informasi tersebar dengan cepat dan audiens mengharapkan komunikasi yang sederhana tetapi mendalam. Penelitian lanjutan nantinya juga dapat menyelidiki dampak jangka panjang penggunaan akronim terhadap persepsi masyarakat terhadap pemerintah, termasuk bagaimana akronim dapat memperkuat atau melemahkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, temuan ini tidak hanya membuat kemajuan besar dalam penelitian linguistik dan komunikasi politik, tetapi juga memberikan pengetahuan praktis yang dapat digunakan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat strategi komunikasi yang lebih masuk akal, efisien, dan relevan di masa depan.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa akronim yang digunakan benar-benar menunjukkan tindakan dan komitmen yang dilakukan, bukan hanya sebagai alat retorika saja. Dengan cara ini, pendekatan komunikasi berbasis akronim tidak hanya mempercepat penyampaian pesan tetapi juga membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M., Rahman, F., Abbas, H., & Sahib, H. (2024). Corpus-Based Diachronic Study of WAR Metaphor in Indonesian Political Discourse. *International Journal of Religion*, 5(7), 515-523.
- Air, J. P. D. H. K., & Tawar, P. VARIASI PENGGUNAAN KONFIKS DALAM PIDATO PRESIDEN RI TAHUN 2021: METODE LINGUISTIK KORPUS.
- Anam, A. K., Hilaliyah, H., & Agustin, Y. (2021). Pembentukan dan Pembidangan Akronim pada Koran Pos Kota. *Deiksis*, 13(1), 12-20.

- Dhika JR, V. T., & Rizal, T. T. F. (2023). Various Word Shorts in the Podcast of Political Figures Sandiaga Uno: Corpus-Based Analysis. *Educaniora: Journal of Education and Humanities*, 1(2), 167-177.
- Hume, D. (2024). Political discourses. In *The History of Taxation Vol 1* (pp. 161-190). Routledge.
- Jiang, B., & Raza, M. Y. (2023). Research on China's renewable energy policies under the dual carbon goals: A political discourse analysis. *Energy Strategy Reviews*, 48, 101118.
- Johnstone, B., & Andrus, J. (2024). *Discourse analysis*. John Wiley & Sons.
- Jupriono, D., Rochim, A. I., & Hakim, L. (2023). Pelesetan Akronim sebagai Strategi Kritik Sosial dan Resistensi Verbal. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra (e-ISSN: 2797-0477)*, 3(02), 32-48.
- Karimi, M. M., & Niazi, S. (2023). Critical Discourse Analysis of. *Lisān-i Mubīn*, 15(54), 25-45.
- Kartikasari, D., Surotin, S., & Dia, E. E. (2024). Analisis Wacana Politik Prabowo Subianto Bicara Gagasan dalam Channel Youtube Najwa Shihab. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5998-6008.
- Lambach, D., & Oppermann, K. (2023). Narratives of digital sovereignty in German political discourse. *Governance*, 36(3), 693-709.
- Rachman, A., Henanggil, M. D. F., Sari, H. Y., & Putri, D. S. (2024, March). PENGGUNAAN PREFIKS DI- DAN TER- OLEH PEMELAJAR BIPA: KAJIAN BERBASIS LINGUISTIK KORPUS. In *Prosiding Seminar Nasional Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, pp. 122-127).
- Sartika, S. (2021). Penggunaan Akronim di Media Sosial Instagram: Kasus Akun@ Andovidalopez. *FKIP e-PROCEEDING*, 253-268.